

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modal utama pembangunan perekonomian Indonesia bergantung pada keberadaan UMKM yang handal dan kuat. Kedudukannya sebagai pemain utama dan tulang punggung dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, yaitu: penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Itu telah terbukti ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997–1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. (Bank Indonesia, 2015).

Keberhasilan UMKM dalam menghadapi masa krisis tidak serta merta menjadikan mereka mampu menjaga kelangsungan usahanya dengan baik. Banyak hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus dihadapi para pelaku UMKM, seperti aspek keuangan, sumber daya manusia (SDM), iklim usaha, infrastruktur dan pemasaran sehingga walaupun memiliki peran yang strategis bagi ekonomi namun upaya mengembangkan sektor UMKM juga bukanlah hal yang mudah (Bank Indonesia, 2015).

Belum adanya kesamaan *mindset* antara persyaratan bank yang harus dipenuhi oleh UMKM, termasuk ketersediaan laporan keuangan dan *bussines*

plan (rencana pengembangan usaha) merupakan kendala yang menyebabkan minimnya akses keuangan UMKM. Padahal dengan adanya laporan keuangan akan memungkinkan pemilik memperoleh data dan informasi yang tersusun secara sistematis. Laporan keuangan berguna bagi pemilik untuk dapat memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi konkret keuangan yang dilaporkan secara lengkap bukan hanya didasarkan pada asumsi semata.

Pemerintah Indonesia, membina UMKM melalui Dinas Koperasi dan UMKM, di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota. Namun kenyataannya UMKM di Indonesia tidak semulus yang dibayangkan. Permasalahan yang terjadi selama ini banyak UMKM atau usaha kecil yang gulung tikar salah satu faktornya adalah tidak konsistennya mereka memakai pembukuan keuangan, seperti misalnya ketika mendapat pinjaman modal dari Bank ternyata arahnya tidak untuk usaha tetapi untuk kebutuhan yang lain, atau tanpa perhitungan kita mengambil uang usaha tersebut untuk keperluan pribadi, dan lain-lain. Di dalam usaha ini kita juga penting untuk melakukan pengelolaan keuangan tersebut, semua harus ada hitungannya, yang mana uang untuk usaha, mana uang untuk pribadi dan mana uang untuk kegiatan sosial. (www.kompasiana.com)¹

¹ Dikutip dari artikel "Pembukuan Keuangan tetap Penting bagi Usaha Kecil" oleh Dhita Arinanda, 24 Juni 2015 dalam <http://www.kompasiana.com/dhitaarinanda/pembukuan-keuangan-tetap-penting-bagi-usaha->

Memang kita sadari bahwa disiplin melakukan pembukuan belum membudaya di Indonesia. Masih sedikitnya UMKM yang melakukan pembukuan secara formal disebabkan oleh beberapa faktor. Paling tidak terdapat dua faktor yang menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Pertama, terbatasnya *skill* manajemen dari pelaku UMKM khususnya mengenai aspek pembukuan dan akuntansi dan yang kedua, biaya untuk menyelenggarakan sistem pembukuan yang standar dirasakan masih terlalu tinggi. (Rohman, 2011) Banyak UMKM yang belum sadar akan pentingnya pencatatan akuntansi atau laporan keuangan dalam usahanya karena terlalu fokus pada proses produksi dan operasionalnya. Terlebih lagi bentuk UMKM yang lebih didominasi perusahaan perseorangan mengakibatkan kurangnya kebutuhan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Bentuk perusahaan perseorangan juga menyebabkan pemisahan keuangan bagi diri pribadi pemilik usaha dengan kegiatan usahanya seringkali juga tidak dilakukan. Akibatnya, terkadang sangat sulit diketahui dengan pasti perkembangan usahanya. Hanya perusahaan besar, atau yang telah masuk ke bursa efek (*go public*) umumnya secara kontinyu melakukan pembukuan dengan baik. Bahkan laporan keuangannya disusun oleh akuntan publik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyadari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi perekonomian nasional harus didukung akses keuangan yang baik agar industri tersebut semakin berkembang. Kurangnya akses ke layanan keuangan dan melek finansial yang rendah menghambat perkembangan UMKM di Indonesia. Pada akhir Februari 2016, pinjaman dalam

negeri untuk UMKM hanya sebesar Rp728,97 triliun, atau 18%, jika dibandingkan dengan total kredit sebesar Rp3.998.09 triliun. Selain itu, UMKM adalah segmen dengan indeks relatif rendah melek finansial. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013, di mana tingkat melek finansial berdiri di 21,84% dan tingkat inklusi keuangan mencapai 59,74%.²

Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menetapkan sebuah peraturan yang mewajibkan UMKM untuk melakukan pencatatan akuntansi yang baik yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam pasal 48 menyatakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang telah memperoleh izin usaha dilakukan oleh pejabat secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya. Pada pasal 49 ditegaskan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, pemegang izin usaha wajib menyusun pembukuan kegiatan usaha.

Saat ini sebagian UMKM telah mulai menyusun laporan keuangan meskipun terbatas untuk memenuhi persyaratan kredit ataupun dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan pembuatan laporan keuangan sendiri memerlukan keterampilan dan pengetahuan mengenai pembukuan akuntansi. Hal ini masih sulit dilakukan karena keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan

² Dikutip dari artikel “Berdayakan UMKM Lewat Literasi Keuangan” oleh Fathia Nurul Haq, 1 Juni 2016 dalam <http://www.mediaindonesia.com/news/read/48378/berdayakan-umkm-lewat-literasi-keuangan/2016-06-01#> yang diakses pada tanggal 27 September 2016

bukanlah hal yang penting bagi UMKM (Said, 2009; dalam Rudiantoro dan Siregar, 2012)

Terkait dengan kondisi tersebut, untuk mempermudah UMKM dalam penyusunan laporan keuangan dan akan pentingnya standardisasi laporan keuangan yang lebih sederhana, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 19 Mei 2009 telah mengesahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang ditujukan khusus bagi entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu salah satunya UMKM dan telah berlaku efektif per 1 Januari 2011.

Penerapan SAK ETAP ini tentu tidak hanya perlu dipersiapkan oleh pelaku UMKM namun juga oleh pemerintah, pihak penyalur kredit dan lembaga akuntansi secara bersama-sama. Mereka juga harus berperan untuk mensosialisasikan standar yang baru kepada pelaku UMKM, memberikan pelatihan dasar akuntansi dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP bagi pelaku UMKM dan membuat program pendukung lainnya.

Sebagai langkah awal untuk menerapkan SAK ETAP secara keseluruhan, peran sosialisasi atau pelatihan bagi UMKM sangat diperlukan agar mereka mengetahui dan memahami tujuan dan cara penerapan standar tersebut. Umumnya proses sosialisasi yang dilakukan IAI meliputi publikasi penetapan dan pengesahan SAK ETAP melalui berbagai media cetak dan sarana komunikasi lainnya, yakni dengan penerbitan buku SAK yang dijual dan disebarluaskan kepada publik, penyelenggaraan berbagai pelatihan, kursus dan seminar bagi pengguna SAK ETAP maupun pihak lain yang berkepentingan.

Sejak saat pengesahan SAK ETAP hingga saat ini, diselenggarakan berbagai pelatihan mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yang ditujukan kepada pelaku UMKM maupun akademisi. Sosialisasi dan pelatihan juga dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta, dan juga perguruan tinggi negeri, misalnya Dinas Koperasi & UMKM Pematang Siantar menjadikan program pelatihan akuntansi sebagai salah satu program kerja tahunan mereka, Prodi Akuntansi FE Unjani memberikan pelatihan SAK ETAP bagi UMKM se Kota Cimahi atau seperti Kadin yang menggandeng *PwC* untuk melakukan pelatihan kepada UMKM sebagai bentuk keprihatinannya pada UMKM yang hanya 5% dari jumlahnya memahami masing-masing laporan keuangannya. (www.bisniskeuangan.kompas.com)

Standar akuntansi ini tentu diharapkan tidak hanya berdampak positif bagi UMKM dalam segi menyiapkan laporan keuangan dengan tujuan pendanaan yang berasal dari pihak perbankan. Dalam jangka panjang penyederhanaan standar akuntansi keuangan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, termasuk UMKM, diharapkan dapat menghilangkan anggapan negatif pelaku usaha yang menganggap bahwa proses pencatatan keuangan dalam akuntansi dan pembuatan laporan keuangan merupakan hal yang sulit. Dengan hilangnya anggapan negatif tersebut, pelaku usaha akan memiliki pikiran terbuka dan keinginan untuk melakukan pencatatan keuangan dengan teliti serta mempelajari akuntansi secara lebih mendalam.

Hal ini tentu tidak hanya berguna bagi UMKM dalam rangka mendapatkan permodalan. Ketersediaan laporan keuangan yang memadai akan menyajikan

informasi dan keuangan mengenai kondisi perusahaan yang lebih relevan, sehingga pelaku UMKM akan mampu melakukan pengambilan keputusan bisnis terkait usaha yang dibangunnya dengan lebih baik di masa yang akan datang. Selain itu, pembuatan laporan keuangan yang layak akan memudahkan perusahaan dalam mencari investor yang mau membantu mengembangkan UMKM. Dengan demikian potensi UMKM untuk terus tumbuh dan berkembang akan semakin baik dalam jangka panjang.

Di wilayah Kabupaten Bogor sendiri, salah satunya di sentra UMKM sepatu dan sandal Kecamatan Ciomas, berdasarkan data pra penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum menerapkan SAK ETAP dalam sistem pencatatan dan pembukuan mereka. Hal ini sangat disayangkan mengingat perkembangan industri di Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang didominasi oleh usaha kecil dan menengah dibandingkan dengan usaha besar. Perkembangan industri di Kabupaten Bogor disajikan dalam Tabel I.1. Selain itu, Kabupaten Bogor juga sebagai penyumbang PDRB terbesar kedua setelah Kabupaten Bekasi terhadap PDRB Jawa Barat.³ Melihat kondisi ini, apabila UMKM dikelola dan dikembangkan dengan baik tentunya akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kesiapan implementasi SAK ETAP pada UMKM dengan mengambil judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK**

³ Data dari Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Bogor tahun 2015

ETAP) pada UMKM di Wilayah Kabupaten Bogor”.

Tabel I.1
Statistik Industri Kabupaten Bogor Tahun 2008-2012

Tahun	Industri Kecil Menengah			Industri Menengah Besar		
	Unit	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp Juta)	Unit	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp Juta)
2008	1.509	18.763	67.386	794	68.690	2.790.666
2009	1.556	19.202	78.765	841	77.629	3.174.479
2010 ^{*)}	1.599	20.186	76.705	881	79.937	3.147.703
2011 ^{*)}	1.682	20.721	84.266	933	85.029	3.328.338
2012 ^{*)}	1.742	21.172	90.639	1.003	89.778	3.542.984
2013	1.800	21.410	95.160	1.024	93.158	3.647.601

Keterangan :
*) Angka Revisi

Sumber: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, 2015

Tabel I.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor dan Sekitarnya
Tahun 2014

Kabupaten/Kota	PDRB (Rp Juta)	Share (%)
Kab. Bekasi	227.469.485,60	16,41
Kab. Bogor	151.285.109,93	10,92
Kota Bogor	29.102.228,90	2,10
Kota Bekasi	64.126.991,25	4,63
Kota Depok	43.675.166,89	3,15
Jawa Barat	1.385.959.440,65	

Sumber: BPS Kab. Bogor, 2015

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran para pelaku UMKM terhadap pencatatan keuangan yang mengakibatkan tidak tersedianya informasi kondisi perusahaan;
2. Sosialisasi & pelatihan mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM dalam hal pembukuan/pencatatan akuntansi
3. Sering dijumpai UMKM yang mengalami kegagalan dalam pengajuan kredit ke bank disebabkan tidak tersedianya informasi akuntansi dari pihak peminjam;
4. Adanya peraturan yang mewajibkan usaha kecil (UMKM) untuk melakukan pembukuan;
5. Sebuah usaha yang baru berdiri masih sangat lemah dan rentan oleh gangguan kecil baik itu dari faktor eksternal dan internal. Sehingga apabila tidak melakukan pembukuan/pencatatan dengan baik.
6. Bagi perusahaan perseorangan, biasanya perlakuan untuk memisahkan uang usaha dan uang pribadi masih sulit dilakukan sehingga kemungkinan akan terjadi ketidakjelasan pemakaian uang usaha.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Karena keterbatasan yang dimiliki peneliti baik dalam hal kemampuan, dana, waktu dan tenaga maka

penelitian ini hanya membatasi masalah pada penerapan SAK ETAP pada industri perajin sepatu dan sandal di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi pengusaha UMKM terhadap penerapan SAK ETAP?
2. Apakah terdapat pengaruh umur usaha terhadap penerapan SAK ETAP?
3. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi dan pelatihan terhadap penerapan SAK ETAP?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti pada variabel-variabel persepsi pengusaha, umur usaha, serta pelatihan dan sosialisasi akuntansi terhadap penerapan SAK ETAP pada UMKM.
 - b. Bagi peneliti lain diharapkan dapat menambah wawasan serta referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam yang berkaitan dengan SAK ETAP.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencatatan akutansi dan pembuatan laporan keuangan, membantu tersosialisasinya SAK ETAP, serta membantu mengetahui kendala yang dihadapi dalam menerapkan SAK ETAP.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana UMKM dalam menerapkan SAK ETAP dan mengetahui cara yang paling efektif dalam membantu implementasi SAK ETAP bagi UMKM.